

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Abdul Halim, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap Peranan DPRD dalam pengawasan Anggaran (Studi Kasus Pada DPRD Se-Propinsi Bengkulu), *Tesis Program Pasca Sarjana UGM*, Jogjakarta.
- Arief Djamaludin, 1982, *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Galia Indonesia, Jakarta
- Banu Witono, 2003, Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, *Jurnal akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No.2
- Deddi Nordiawan, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba empat, Jakarta
- Erahman, 2005, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai pemoderasi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 6, No. 1, Februari 1-25
- Ietje Nazaruddin, 2003, *Praktik Komputer Statistika*, UPFE, Yogyakarta
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Indra Bastistan, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Isma Coryanata, 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), *Simposium nasional Akuntansi X*, Makasar
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Simson Werimon, 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), *Simposium nasional Akuntansi X*, Makasar

Sopannah, 2002, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawas APBD, *Tesis Program Pasca Sarjana UGM*, Jogjakarta

Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintahan Daerah*

_____, Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

_____, Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*